

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung (Disnaker) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Disnaker sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Disnaker Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Disnaker Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian (Sesuai Peraturan Bupati Nomor 35 Th. 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung).

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial dan transmigrasi
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 6) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- 7) Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Disnaker Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perencanaan, penyusunan program dan/atau kegiatan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas dan transmigrasi.

Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi 3 (tiga) Kepala seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas:
Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi pelatihan bagi lembaga kerja swasta dan pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, fasilitasi pemagangan, pengukuran produktivitas tenaga kerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja; mempunyai tugas:
Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara (AKAN), tanda daftar pendirian bursa kerja khusus (BKK), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), pembuatan rekom paspor CTKI, penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan untuk perlindungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

c. Kepala Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; mempunyai tugas:

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja (IPK) dan penyelenggaraan bursa kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja, penyuluhan dan bimbingan ketransmigrasian, pendaftaran dan seleksi calon transmigran, peninjauan kerjasama dengan daerah penempatan, fasilitasi penyusunan kerjasama antar daerah (KSAD) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Hubungan Industrial; mempunyai tugas sebagai berikut:

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan, penyelesaian di luar pengadilan, fasilitasi kegiatan lembaga tripartite

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja.

- b. Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja; mempunyai tugas sebagai berikut:
Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan usulan penetapan UMK, fasilitasi verifikasi peraturan perusahaan, fasilitasi pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, mediasi perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, membina lembaga kerjasama bipartite serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja.

5. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memimpin UPTD yang merupakan unsur pelaksana operasional dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan tenaga kerja.

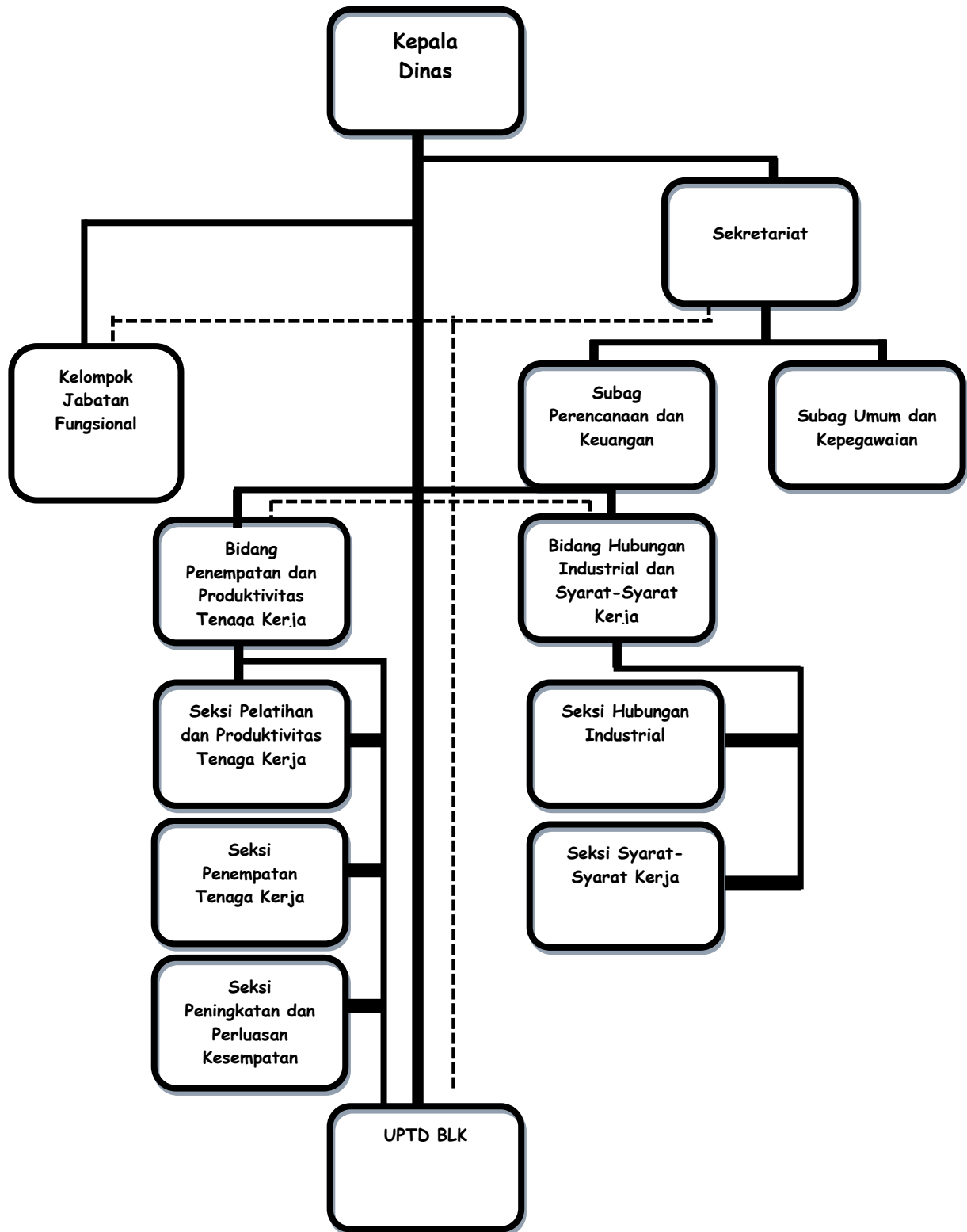
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK dibantu oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja;
2. Pengelolaan administrasi umum pelatihan kerja;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian seluruh personil UPTD Balai Latihan Kerja, termasuk jabatan fungsional instruktur;
4. Pengelolaan administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab UPTD Balai Latihan Kerja; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Balai Latihan kerja.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Disnaker sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar A.3.
Bagan Organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



Sumber Daya Manusia pada Disnaker Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan Bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel A.4.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2020

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	-	
	b.	SMP	1	
	b.	SMA	13	
	b.	D1	-	
	c.	D2	-	
	d.	D3	9	
	e.	S-1	14	
	f.	S-2	3	
Jumlah			40	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	1	
	B	Gol II	5	
	C	Gol III	29	
	D	Gol IV	5	
Jumlah			40	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	3	
	C	Eselon IV	8	
	D	Eselon V	-	
	E	Jabatan Fungsional Khusus	17	
	F	Jabatan Fungsional Umum	11	
Jumlah			40	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 21 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1, SMA, SMP dan SD yang terdiri dari tenaga administrasi berjumlah 8 orang, tenaga kebersihan berjumlah 6 orang, pengemudi/sopir berjumlah 1 orang dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Disnaker Kabupaten Temanggung.

Tabel A.5.
Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja
Kab. Temanggung Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	23.085	M2	-
b.	Gedung	29	Gedung	Cukup
c.	Alat-alat angkutan	43	Buah	Cukup
d.	Alat-alat perkantoran	3.803	Buah	Cukup
	Dengan rincian :			
	KIB A	2	Unit	Rp.1.893.350.000,-
	KIB B	2.388	Unit	Rp. 7.663.056.163,-
	KIB C	29	Unit	Rp. 13.803.133.193,-
	KIB D	14	Unit	Rp. 496.866.796,-
	KIB E	18	Unit	Rp. 9.591.500,-
	KIB F	0		0
	Aset lainnya	64	unit	Rp. 475.159.400,-
	Aset Ekstra komtabel	1.288	unit	Rp. 122.456.715,-

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Disnaker Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM di sekretariat, semua bidang dan UPTD BLK;

2. Kapasitas pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat (jumlah pencari kerja yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah anggaran dan paket kegiatan yang mengarah pada kegiatan pelatihan keterampilan kerja);
3. Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja;
4. Kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan lapangan kerja;
5. Sudah seharusnya meninggalkan pelatihan keterampilan pencari kerja konvensional dan beralih ke pelatihan keterampilan modern dimana peluang usaha jasanya masih terbuka lebar;
6. Belum adanya forum koordinasi antara lembaga swasta yang melaksanakan pelatihan dengan Dinas Tenaga Kerja tentang kebutuhan yang sesuai pasar kerja;
7. Masih adanya permasalahan hubungan industrial yang kurang harmonis antara pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Hal ini dibuktikan dalam Tahun 2020 ada 14 (empat belas) kasus penyelesaian hubungan industrial;
8. Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada lulusan pelatihan kewirausahaan.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

➤ BIDANG TENAGA KERJA

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran Terbuka terdiri dari :

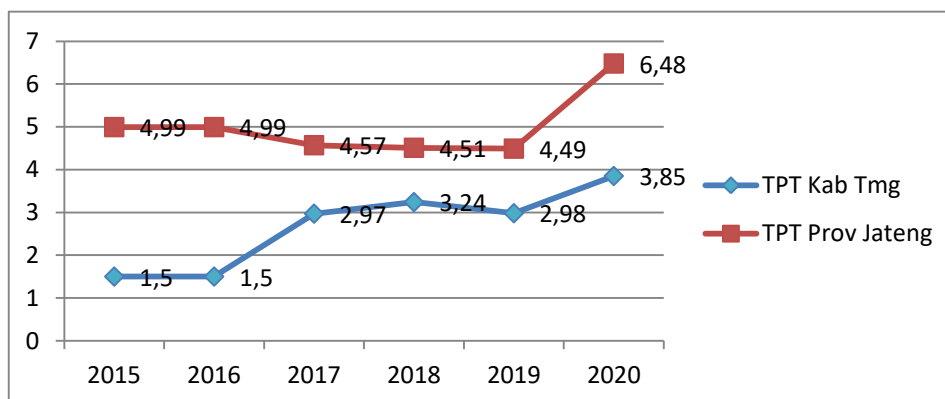
- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kondisi TPT di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik B.1.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015–2020



Sumber : Sakernas (BPS Kabupaten Temanggung)

Sepanjang 6 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah dibanding TPT Provinsi Jateng, TPT Kabupaten Temanggung selalu dibawah 5%, Naik tertinggi terjadi pada tahun 2020 ini yaitu mencapai 3,85% dan terendah pada Tahun 2015 sebesar 1.50%. Pada Tahun 2016 juga masih sama sebesar 1,50% karena tidak dilakukan survey oleh BPS.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

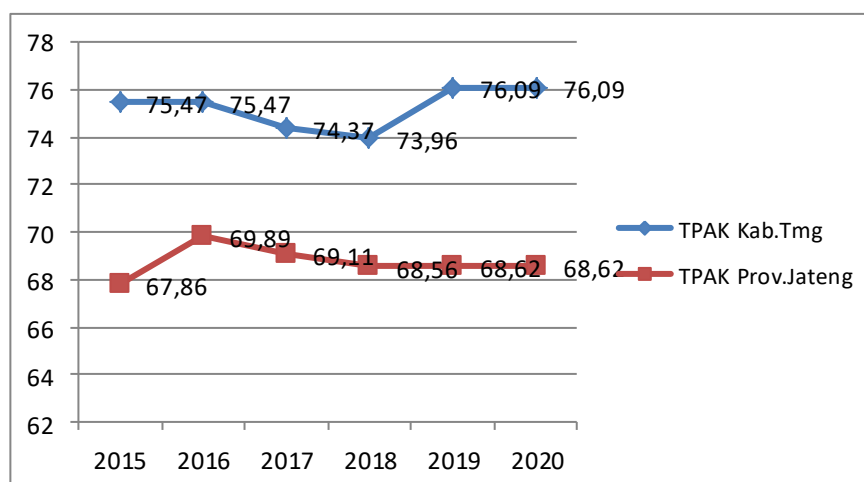
TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Rumus TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Tabel B.2.
Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov.Jateng
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	TPAK Kab.Tmg	TPAK Prov.Jateng
2015	75,47	67,86
2016	75,47	69,89
2017	74,37	69,11
2018	73,96	68,56
2019	76,09	68,62
2020	76,09	68,62

Grafik B.2.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Sumber : BPS

Sepanjang 6 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Dari grafik 1.1 pada tahun 2016 ke 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, kemudian naik sedikit di tahun 2019. Faktor yang

mempengaruhi TPAK dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja.

TPAK Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir selalu lebih tinggi dari TPAK Provinsi Jateng yang menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Temanggung.

3. Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja

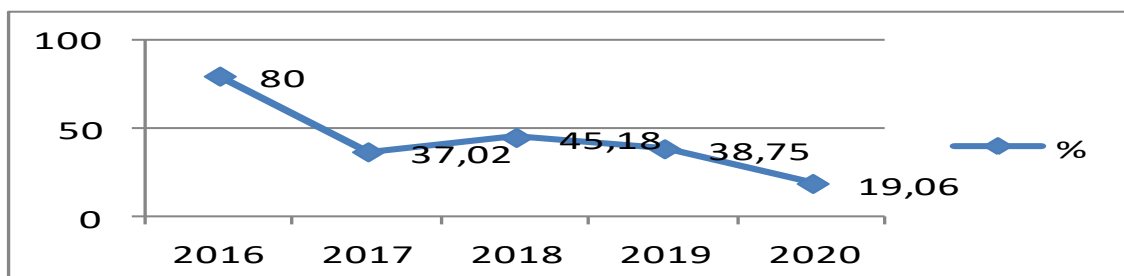
Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

Rumus Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja adalah Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %.

Tabel B.3.
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan dan Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan yang Menjadi Wirausaha Baru/ Telah Bekerja Tahun Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta pelatihan keterampilan	...	480	832	768	240	320
Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja	384	308	347	93	61
%	80	37,02	45,18	38,75	19,06

Grafik B.3.
% Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan yang Menjadi Wirausaha Baru/ Telah Bekerja Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2020 Dana APBN sebanyak 10 jurusan, dana APBD sebanyak 5 jurusan dan dari hasil monitoring lulusan peserta pelatihan, 49 orang bekerja pada sektor industri, dan 12 orang usaha mandiri. Untuk Tahun 2015 tidak mempunyai data, karena indikator kinerja ini baru dimulai pada tahun 2016.

4. Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja.

Pencari kerja yang terdaftar tersebut dapat difasilitasi penempatan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara)

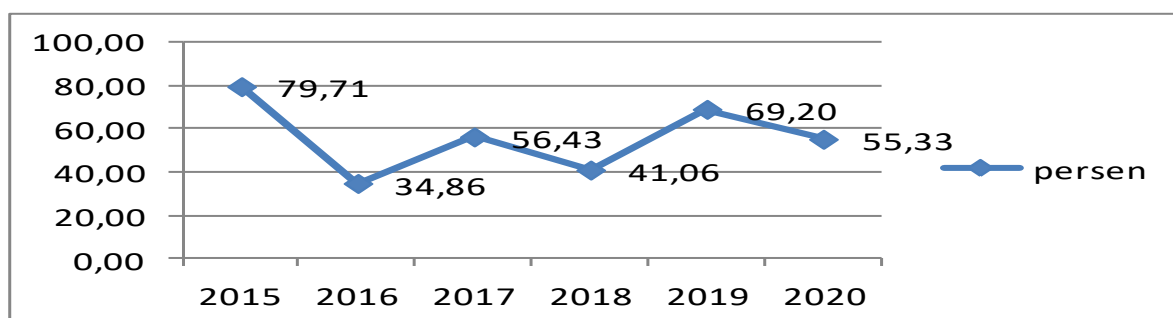
Rumus Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan adalah jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel B.4.
Daftar Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	1304	1000	1027	1034	2357	602
Pencari Kerja terdaftar	1636	2869	1820	2518	3406	1088
%	79,71	34,86	56,43	41,06	69,2	55,33

Grafik B.4.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase

tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan

Realisasinya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena masa pandemi covid 19, lowongan pekerjaan menurun drastis. Pencaker yang mendaftar pun, lebih memilih untuk menciptakan pekerjaan sendiri daripada mencari pekerjaan di perusahaan.

5. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Definisi pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (*off the job training*) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (*on the job training*).

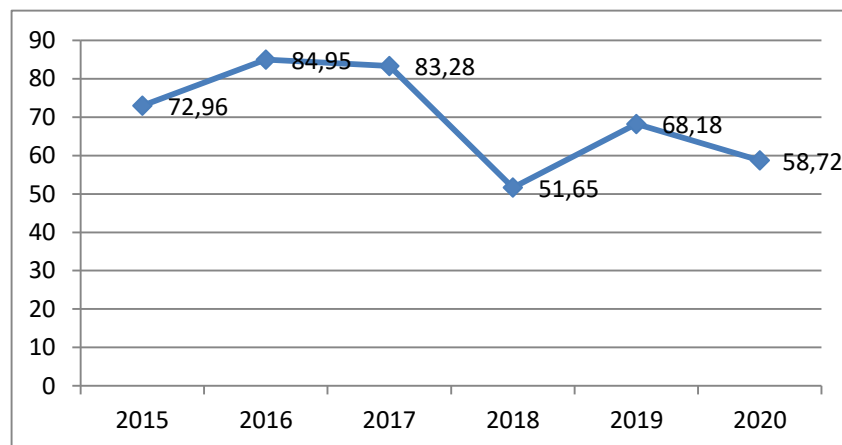
Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja

Rumus Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.

Tabel B.5.
Jumlah Pendaftar dan Peserta Pelatihan Kerja
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	464	480	832	768	240	320
Jumlah pendaftar pelatihan	636	565	999	1487	352	545
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,96	84,95	83,28	51,65	68,18	58,72

Grafik B.5.
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2020 Dana APBN sebanyak 10 jurusan, dana APBD sebanyak 5 jurusan. Dengan total pendaftar 545 orang dan dilatih sebanyak 320 orang.

6. Tingkat Setengah Pengangguran

Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tingkat Setengah Pengangguran adalah persentase jumlah Pengangguran setengah menganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah

angkatan kerja, digunakan untuk menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Tingkat Setengah Pengangguran menunjukkan Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang termanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

Rumus Tingkat Setengah Pengangguran adalah jumlah Pengangguran setengah menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kondisi Tingkat Setengah Pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel B.6.
Tingkat Setengah Pengangguran
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengangguran setengah menganggur	27.124	55.760	23.236
Jumlah Angkatan Kerja				437.295	455.242	455.242
Tingkat Setengah Pengangguran	6,2	12,25	5,10

Sumber :BPS

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka setengah pengangguran melonjak cukup tinggi mencapai 2 kali lipat di Tahun 2019. Kemudian di Tahun 2020 kembali menurun. Indikator ini adalah indikator SDGs dan baru masuk di Indikator kinerja Disnaker mulai tahun 2018.

7. Presentase Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum.

Rumus Presentase Tenaga Kerja Formal adalah jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%.

Kondisi Tenaga Kerja Formal dibanding Jumlah seluruh Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel B.7.
Presentase Tenaga Kerja Formal
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah tenaga kerja formal				118.204	139.942	139.942
jumlah tenaga kerja total				423.133	441.632	441.632
Presentase Tenaga Kerja Formal(%)	27,94	31,69	31,69

Sumber : BPS

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja bertambah di sektor formal, sedang untuk sektor informal tidak mengalami perubahan berarti. Hal sudah sesuai dengan harapan pemerintah untuk lebih meningkatkan jumlah tenaga di sector formal daripada informal. Data didapat dari BPS, Data terakhir pada tahun 2019. Sedangkan untuk 2020 masih menggunakan data 2019. Indikator ini adalah indikator SDGs dan baru masuk di Indikator kinerja Disnaker mulai tahun 2018.

8. Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

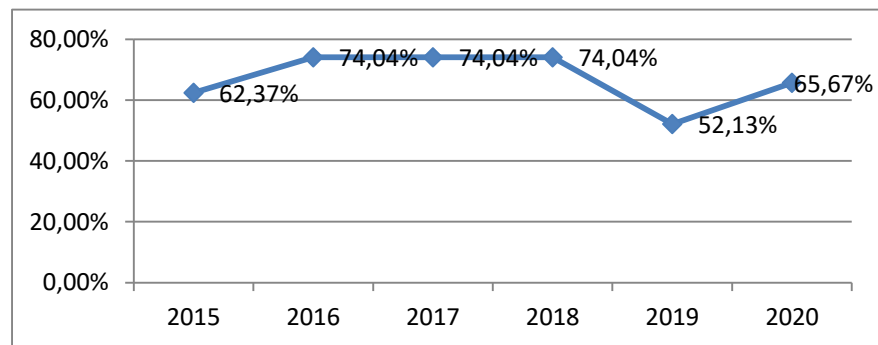
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Rumus Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.

Tabel B.8a.
Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja peserta BPJS	14.613	20.548	20.548	20.548	14.467	18.223
Jumlah pekerja total	23.431	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
Persentase tenaga kerja di perusahaan mendapat upah sesuai UMK (%)	62,37	74,04	74,04	74,04	52,13	65,67

Grafik B.8.
Grafik Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Data Tahun 2015-2016 diatas di dapat dari perusahaan yang menyetorkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kemudian data Tahun 2017-2018 belum ada perubahan data karena pada tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan se Kabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari sekitar 397 perusahaan atau sekitar 25%, dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja.

Tabel B.8b.
Data Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja di Perusahaan
pada Pendataan Tahun 2020

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA					PESERTA BPJS	
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
1	Duta Sumpit Indonesia, PT	Soropadan Pringsurat Tmg	191	174			365	114	356
2	Tanjung Kreasi Parquet Industry, PT	Jl Raya Ambarawa Magelang Km 13 Pingit Pringsurat Tmg	908	237			1.145	1.145	1.145
3	Wana Awet Mas, PT	Jl Pringsurat Kranggan Tmg	54	56			110	110	75
4	PT Kayu Lima Utama	Jl Tembus Pringsurat Km 1 Kranggan Tmg	48	178			226	128	98
5	Putra Tama Jaya, CV	Jl Raya Parakan Wonosobo Km 2 Parakan	403	215			618	571	501
6	Larasati Abadi Jaya, PT	Tegesan Rt 002 / 004 Samiranan Kandangan Temanggung	27	43			70	49	49
7	Dharma Satya Nusantara, PT	Jl Raya Kranggan Pringsurat Kranggan Tmg	746	349	1		1.096	1.095	1.095
8	Pundi Alam Perkasa, PT	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Temanggung	199	91			290	45	130
9	Decorus, CV	Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 12 Ngipik Pringsurat	64	16	-	-	80	70	70
10	Sekawan Sumber Sejahtera, PT	Jl. Raya Magelang Semarang Km. 19 Temanggung	307	254			561	478	392
11	Central Jawa Wood Industri	Jl. Pringsurat Km. 03 Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Tmg	569	1.018	5		1.592	1.592	933
12	Piranti Works, CV	RT 2 RW 7, Dsn. Krajan, Ds/Kec. Kandangan, Tmg	11	3			14	14	14
13	Gentong Makmur, UD	Ds. Rejosari Krajan I RT 04/02, Pringsurat, Temanggung	48	32			80	80	40
14	Dadi Mulyo,	Jl. Raya Magelang -							

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
	CV	Semarang Km. 20	163	51			214	214	131
15	Sekawan Sahabat Sejati, PT	Jl. Raya Kranggan Pringsurat Km. 3 Kranggan Tmg 56271	134	157			291	289	289
16	UD. Rahma Jaya	Jl. Raya Temanggung KM. 2, Mendirat, Pare	120	75			195	130	124
17	CV. Sumber Anugerah	Tegalsari RT 01/07, Kupa Pringsurat, Temanggung	237	230			467	253	143
18	Sinar Sengon Sejahtera, CV	Jl. Raya Kupa Pringsurat KM. 4, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung	437	352			789	789	789
19	Albasia Kayu Prima, PT	Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Nguwet, Kranggan	116	93	1	1	211	189	135
20	CV. Karya Lima Bersama	Jl. Raya Kepatihan Medono Soropadan						27	7
21	PT. Matratama Manunggal Jaya	Jl. Raya Magelang Semarang Km 15,5 Kaliampo Pringsurat Tmg	182	148			330	330	242
22	PT. Sensasi Guna Terutama	Jl. Raya Kandangan Km. 3 Kedungwiyu	65	49			114		
23	PT. Albasia Sejahtera Mandiri	Jl Raya Wonosobo Km 2 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	88	96			184	18	184
24	PT. Putra Albasia Mandiri	Jl Raya Wonosobo Km 2 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	182	151			333	17	21
25	PT. Albasia Temanggung Jaya	Jl Raya Kranggan Pringsurat Km 3 Nguwet Kranggan Tmg	167	123			290	112	7
26	UD. Sumber Manis	Jl Raya Ambarawa Magelang Km 18 Pingit Pringsurat Tmg	16	9			25	4	
27	CV. Muara Kayu	Dsn Kebumen Kelurahan Kebumen Kecamatan Pringsurat Kab Temanggung	15	8			23		23

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
28	PT. Prima Wana kreasi wood Industri	Jl raya Tembus Pringsurat Kranggan Kupon Pringgsurat	216	222			438	430	306
29	CV. Mirai Alam Sejahtera	Jl Raya Magelang Semarang Km 12,8 Soropadan Pringsurat	6	5			11	11	11
30	PT. Eastmark International indonesia	Jl. Sarbini No 288 Madureso Temanggung Jawa Tengah	174	126	4	1	305	319	319
31	PT. Kayu Sengon Industri	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.6	148	84			232	232	232
32	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Jl Raya Kedu KM 3, Candimulyo, Kedu	961	698	1		1.660	1.660	1.646
33	CV Cipta Usaha Mandiri	Jl. Raya Ngadiejo Km 3, Medari, Ngadirejo	104	122			226	157	157
34	PT Gelora Citra Kimia Abadi	Jl. Raya Kranggan Pringsurat Km 2 Temanggung 56271	217	22			239	239	
35	PT Sumber Makmur Anugerah	Jl. Magelang Semarang Km. 16,1 Pringsurat	364	15			379	318	303
36	PT. YB Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan - Pringsurat Km 3 Nguwet Kranggan Tmg	66	1.075	3	1	1.145	1.141	1.141
37	PT. Usaha Dua Sahabat	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Temanggung	38	6			44	32	19
38	PT Temanggung Gas Abadi	Karanganyar Mojotengah Kedu	8				8	8	8
39	PT Kebon Arum Abadi	Jln Letjend Suprpto No.28	9	2			11	11	8
40	Mitra Manunggal Perkasa, PT	Jl. Raya Kedu Parakan Km 09 Mojotengah Kedu Temanggung	31	3			34	28	34
41	BPR Dwiarta Sagriya Cab. Ngadirejo, PT	Jl Raya Candiroto 100 A Ngadirejo	6	3			9	6	6
42	BPR Bank Pasar,PD	Jl Letjend Suprpto 32 Temanggung	64	23			87	87	87

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
43	BPR Kusuma Sumbing, PT	Jl Kosasih No 40 Parakan	42	22			64	64	64
44	BPR Multi Arthanusa, PT	Desa Petirejo Ngadirejo	20	11			31	32	26
45	BKK Temanggung, PD	Jl Suyoto 32 Tmg	34	15			49	107	107
46	BPR Intan Surya, PT	Jl Raya Kranggan 331 Kranggan Temanggung	27	10			37	30	27
47	KSP Kopdit Pelita Usaha	Jl. Tentara genie Pelajar No. 3 Temanggung	24	20			44	32	32
48	BRI (Persero) Tbk Kanca Tmg, PT	Jl. Jendral Sudirman No. 17 Tmg	134	67			201	201	201
49	Artha Mertoyudan, PT BPR	Jl. Diponegoro No. 7 Tmg	14	3			17	16	16
50	KSP Intidana	Jl. Sri Sarwono No 1 Ruko PJKA Blok 7-8 Tmg	7	5			12	12	
51	Perum Pegadaian	Jl. Tentara Pelajar, Temanggung	37	7			44	44	44
52	KSPPS Anugrah	Jl. Diponegoro 100A Parakan Temanggung 56254	94	48			142	133	121
53	BPR Surya Yudha, PT Cabang Temanggung	Jl. Jend Sudirman no. 120 B, Temanggung	29	22			51	51	51
54	FIF Group	Jl Diponegoro ruko terminal lama 4/5	71	17			88	88	88
55	PT Adira Dinamika Multi Finance	Jl Jendral Sudirman No 119 A Rejosari Kowangan	96	18			114	114	114
56	PT Pegadaian (Cab TMG)	Jl Tentara Pelajar No 7, Temanggung	37	7	-	-	44	44	44
57	PT. Mandala Multi Finance	Jl. Pahlawan No. 8 Temanggung	25	4			29	29	29
58	WOM Finance, PT	Jl. Gatot Subroto No. 169 A, Tawang Sari,	15	1			16	17	17

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
		Kebonsari							
59	Ngesti Waluyo, RSK	Jl Pahlawan Parakan Temanggung	173	294			467	399	399
60	PKU Muhammadiyah, RS	Jl Raya Kedu Km 2 Kalisat Bulu	144	196			340	284	278
61	Gunung Sawo, RSU	Jl Gatot Subroto 56 Manding Tmg	20	50			70	54	67
62	Apotik Waringin Mulya, Perusda	Jl Diponegoro 26 Tmg 56212	6	11			17	9	9
63	Kintamani, Hotel	Jl Suwandi Suwardi Desa Madureso Tmg	7				7	4	4
64	Chandra, Hotel	Jl Pahlawan No 27 Tmg Telp 491645	5	1			6		
65	Indraloka Griya Sentosa, PT	Jl Suwandi Suwardi No 3 Tmg	21	19			40	30	30
66	Nirwana, Hotel	Jl.Suwardi Suwardi No. IIA Tmg	3	2			5	3	5
67	Hotel Ayu	Jl. Kaloran No 1 Gandulan Temanggung	4	2			6		
68	Hotel Ardita	Jl. Raya Bulu – Temanggung	2	3			5		
69	PT. Lasri Ayu sahardja Mulya	Jl Raya Temanggung Bulu KM 04 Bulu Temanggung	10	5			15	6	
70	PT Eco Rizky Munza (SPBU Karanggedong)	Jl. Ngadirejo - Parakan Karanggedong	7	9			16		16
71	Lia Resto	Jl. Wonosobo Km 3, Tanduran, Catuanom	6	4			10		10
72	RM Jambu Klutuk	Jl Raya Parakan-Wonosobo Km 3 Tandura Caturanom Parakan	23	5			28	21	
73	RM Nikki	Jl Jendral Gatot Subroto Pandean Tmg	9	12			21		
74	RM. Lukito	Badran kranggan temanggung	14	22			36	15	

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
75	Pondok Lesehan Kampoeng Sawah	Jl Gatot subroto no 25 kebonsari tmg	23	19			42	32	22
76	Perusda Aneka Usaha	Jl Jend Sudirman 140 tmg	20	12			32	7	32
77	CV. Mahendra Citra Media	Jl. Terusan Sumbing 3 No 2 Temanggung	11	6			17	17	
78	Cendana Giri, CV	Jl. Gatot Subroto No.7 Temanggung	39	13			52	44	44
79	Sudirman Motor, CV	Jl. Jendral Sudirman No. 65, Tmg	14	12			26	10	9
80	PT Rejeki Sukses Santoso (Mataram Sakti)	Jl. Raya Kranggan No.38	20	6			26	3	3
81	Tirtamas Lestari, PT	Jl Raya Pikatan Mudal Tmg	141	35			176	145	145
82	PDAM "Tirta Agung" Kab Temanggung	Jl Suyoto No. 3B, Temanggung	87	18			105	88	94
83	CV. Catur Manunggal Sejati	Jln Mayjend Sutoyo RT 06/06 Tmg	41	56			97	97	50
84	PT. Swalayan Mahkota	Jl. MT Haryono No. 63 Temanggung	77	111			188	187	148
85	Pandean Square	Jl MT Hariyono No 68 Pandean Tmg	7	8			15		8
86	Surya Swalayan	Jl Diponegoro 14 Tmg	21	17			38		
87	Surya Timur, CV	Jl. Suyoto No. 15 Temanggung	6	14			20	9	9
88	Safari Dharma Jaya/Sakti, PO	Jl Diponegoro 25 Tmg	301	32			333	333	333
89	CV. Unicon Precast Concretes	Jl Raya Kranggan Pringsurat Kupon Pringsurat Tmg	12	3			15		
90	Vas Catering	Sanggrahan Rt 01 Rw 01 Kranggan	15	6			21	3	8

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
		Temanggung							
91	PT. Intiplas Sukses Makmur	Jl. MT. Haryono No. 53 Tmg	178	5			183	161	161
92	Telkom, PT	Jl.Jed.Sudirman Tmg.	18	2			20		20
93	CV Citra Kasih	Jl Pahlawan No 53 Tmg	32	23			55	38	29
94	CV Prima Utama	Jl Sundoro No 16 Kertosari Tmg	42	1			43	43	41
95	Bhumi Phala Wisata, PD	Kompleks Pikatan Water Park RT 5 RW 5, Mudal	31	15			46	46	40
96	PT Gudang Garam, Tbk	Jln. Raya Bulu KM 5 Temanggung	74	10			84	75	75
97	Toko Kondang	Jl WR Supratman 19 Tmg		8			8		2
98	Ceto 3, Ternak Ayam	Ds Keblukan Kec. Kaloran Kab. Tmg	5	7			12		
99	CV. Organik Super Agro	Jln, Raya Jogja-Semarang Pringsurat Temanggung	33				33	10	10
100	CV Niaga Perkasa	Jl Sundoro No 16 Kertosari Tmg	10	3			13	13	13
101	Toko Renes	Jln. Pahlawan No 2C Temanggung		8			8		
102	Arjuna, Toko Mas	Jl Letjend S Parman 19 Tmg.	3	10			13	13	12
103	PT. Wahana Dinamika Muda	Jl. Suwandi Suwardi No.2, Temanggung	51	53			104	104	104
104	PT. Djasa-Djasa	Jl. Tentara Pelajar 2B, Temanggung					77		
105	CV Karya Pratama	Petirejo, RT 03/02, Ngadirejo	2	140			142		25
106	PT. PLN Parakan	Jl. Raya Kedu Km 2 Parakan	168	10			178	178	178
107	CV Kukuh Tentrem Santoso	Krajan I, Kandangan	32	27			59	59	21
108	PT. Kelola Agro Makmur	Jl. Raya Krangan-Pringsurat KM 2,2, Kranggan	77	73			150	34	41

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				PESERTA BPJS		
			WNI		WNA		JML	TK	KES
			LK	PR	LK	PR			
109	PT. Shoenary Javanesia Inc	Jl. Raya Temanggung-Secang KM 8, Kranggan	793	1.362	6	1	2.162	1.845	1.841
110	PT. Trimegah Cipta Mandiri	Perum Pondok Indah, Jln. Tlogosarangan 1 No. 17 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang	193	99			292	292	292
		Jumah Total	11.453	9.651	21	4	21.206	17.975	16.587

9. Persentase perusahaan yang telah membayar upah sesuai UMK

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.

UMK Kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.825.200,-.

Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2020

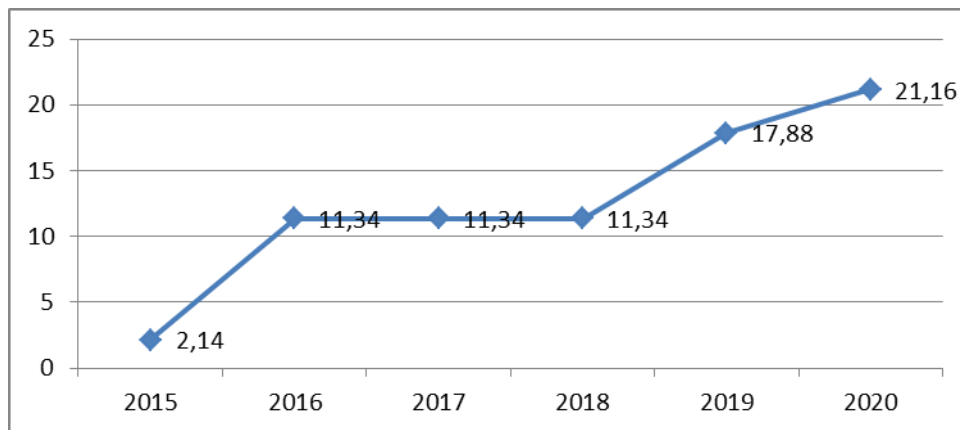
Indikatornya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase perusahaan yang telah membayar upah sesuai UMK adalah jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel B.9a.
Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun
2015-2020 Triwulan IV

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	%
2015	280	6	2,14
2016	397	45	11,34
2017	397	45	11,34
2018	397	45	11,34
2019	397	71	17,88
2020	397	84	21,16

Grafik B.9.
Grafik Persentase Perusahaan
yang Telah Membayarkan Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 Triwulan IV



Data Tahun 2015-2016 diatas didapat dari perusahaan yang menyetorkan WLKP. Kemudian data tahun 2017-2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan se Kabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan atau sekitar 25% dengan 16.601 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja. Dan

perusahaan yang membayar upah sesuai UMK naik dari 71 menjadi 84 perusahaan.

Tabel B.9b.
Data Perusahaan yang Membayarkan Upah Sesuai UMK

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	PR				
			LK	PR	LK	PR			√	
1	Duta Sumpit Indonesia, PT	Soropadan Pringsurat Tmg	191	174			365	√		
2	Tanjung Kreasi Parquet Industry, PT	Jl Raya Ambarawa Magelang Km 13 Pingit Pringsurat Tmg	908	237			1.145	√		
3	Wana Awet Mas, PT	Jl Pringsurat Kranggan Tmg	54	56			110	√		
4	PT Kayu Lima Utama	Jl Tembus Pringsurat Km 1 Kranggan Tmg	48	178			226	√		
5	Putra Tama Jaya, CV	Jl Raya Parakan Wonosobo Km 2 Parakan	403	215			618	√		
6	Larasati Abadi Jaya, PT	Tegesan Rt 002 / 004 Samiranan Kandangan Temanggung	27	43			70	√		
7	Dharma Satya Nusantara, PT	Jl Raya Kranggan Pringsurat Kranggan Tmg	746	349	1		1.096	√		
8	Pundi Alam Perkasa, PT	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Temanggung	199	91			290	√		
9	Decorus, CV	Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 12 Ngipik Pringsurat	64	16	-	-	80	√		
10	Sekawan Sumber Sejahtera, PT	Jl. Raya Magelang Semarang Km. 19 Temanggung	307	254			561	√		
11	Central Jawa Wood Industri	Jl. Pringsurat Km. 03 Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Tmg	569	1.018	5		1.592	√		
12	Piranti Works, CV	RT 2 RW 7, Dsn. Krajan, Ds/Kec.	11	3			14	√		

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	P R				
		Kandangan, Tmg								
13	Gentong Makmur, UD	Ds. Rejosari Krajan I RT 04/02, Pringsurat, Temanggung	48	32			80	√		
14	Dadi Mulyo, CV	Jl. Raya Magelang - Semarang Km. 20	163	51			214	√		
15	Sekawan Sahabat Sejati, PT	Jl. Raya Kranggan Pringsurat Km. 3 Kranggan Tmg 56271	134	157			291	√		
16	UD. Rahma Jaya	Jl. Raya Temanggung KM. 2, Mendirat, Pare	120	75			195	√		
17	CV. Sumber Anugerah	Tegalsari RT 01/07, Kupon Pringsurat, Temanggung	237	230			467	√		
18	Sinar Sengon Sejahtera, CV	Jl. Raya Kupon Pringsurat KM. 4, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung	437	352			789	√		
19	Albasia Kayu Prima, PT	Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Nguwet, Kranggan	116	93	1	1	211	√		
20	CV. Karya Lima Bersama	Jl. Raya Kepatihan Medono Soropadan						√		
21	PT. Matratama Manunggal Jaya	Jl. Raya Magelang Semarang Km 15,5 Kaliampo Pringsurat Tmg	182	148			330	√		
22	PT. Sensasi Guna Terutama	Jl. Raya Kandangan Km. 3 Kedungwiyu	65	49			114	√		
23	PT . Albasia Sejahtera Mandiri	Jl Raya Wonosobo Km 2 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	88	96			184	√		
24	PT. Putra Albasia Mandiri	Jl Raya Wonosobo Km 2 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	182	151			333	√		
25	PT. Albasia	Jl Raya Kranggan						√		

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	P R				
	Temanggung Jaya	Pringsurat Km 3 Nguwet Kranggan Tmg	167	123			290			
26	UD. Sumber Manis	Jl Raya Ambarawa Magelang Km 18 Pingit Pringsurat Tmg	16	9			25	√		
27	CV. Muara Kayu	Dsn Kebumen Kelurahan Kebumen Kecamatan Pringsurat Kab Temanggung	15	8			23	√		
28	PT. Prima Wana kreasi wood Industri	Jl raya Tembus Pringsurat Kranggan Kupa Pringsurat	216	222			438	√		
29	CV. Mirai Alam Sejahtera	Jl Raya Magelang Semarang Km 12,8 Soropadan Pringsurat	6	5			11	√		
30	PT. Eastmark International indonesia	Jl. Sarbini No 288 Madureso Temanggung Jawa Tengah	174	126	4	1	305	√		
31	PT. Kayu Sengon Industri	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.6	148	84			232	√		
32	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Jl Raya Kedu KM 3, Candimulyo, Kedu	961	698	1		1.660	√		
33	CV Cipta Usaha Mandiri	Jl. Raya Ngadiejo Km 3, Medari, Ngadirejo	104	122			226	√		
34	PT Gelora Citra Kimia Abadi	Jl. Raya Kranggan Pringsurat Km 2 Temanggung 56271	217	22			239	√		
35	PT Sumber Makmur Anugerah	Jl. Magelang Semarang Km. 16,1 Pringsurat	364	15			379	√		
36	PT. YB Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan - Pringsurat Km 3 Nguwet Kranggan Tmg	66	1.075	3	1	1.145	√		
37	PT. Usaha Dua Sahabat	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km 1,4 Temanggung	38	6			44	√		

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	PR				
38	PT Temanggung Gas Abadi	Karanganyar Mojotengah Kedu	8				8	√		
39	PT Kebon Arum Abadi	Jln Letjend Suprpto No.28	9	2			11	√		
40	Mitra Manunggal Perkasa, PT	Jl. Raya Kedu Parakan Km 09 Mojotengah Kedu Temanggung	31	3			34	√		
41	BPR Dwiarta Sagriya Cab. Ngadirejo, PT	Jl Raya Candiroto 100 A Ngadirejo	6	3			9	√		
42	BPR Bank Pasar,PD	Jl Letjend Suprpto 32 Temanggung	64	23			87	√		
43	BPR Kusuma Sumbing, PT	Jl Kosasih No 40 Parakan	42	22			64	√		
44	BPR Multi Arthanusa, PT	Desa Petirejo Ngadirejo	20	11			31			√
45	BKK Temanggung, PD	Jl Suyoto 32 Tmg	34	15			49	√		
46	BPR Intan Surya, PT	Jl Raya Kranggan 331 Kranggan Temanggung	27	10			37			√
47	KSP Kopdit Pelita Usaha	Jl. Tentara genie Pelajar No. 3 Temanggung	24	20			44			√
48	BRI (Persero) Tbk Kanca Tmg, PT	Jl. Jendral Sudirman No. 17 Tmg	134	67			201			√
49	Artha Mertoyudan, PT BPR	Jl. Diponegoro No. 7 Tmg	14	3			17	√		
50	KSP Intidana	Jl. Sri Sarwono No 1 Ruko PJKA Blok 7-8 Tmg	7	5			12	√		
51	Perum Pegadaian	Jl. Tentara Pelajar, Temanggung	37	7			44			√
52	KSPPS Anugrah	Jl. Diponegoro 100A Parakan	94	48			142	√		

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	PR				
		Temanggung 56254								
53	BPR Surya Yudha, PT Cabang Temanggung	Jl. Jend Sudirman no. 120 B, Temanggung	29	22			51		√	
54	FIF Group	Jl Diponegoro ruko terminal lama 4/5	71	17			88	√		
55	PT Adira Dinamika Multi Finance	Jl Jendral Sudirman No 119 A Rejosari Kowangan	96	18			114	√		
56	PT Pegadaian (Cab TMG)	Jl Tentara Pelajar No 7, Temanggung	37	7	-	-	44	√		
57	PT. Mandala Multi Finance	Jl. Pahlawan No. 8 Temanggung	25	4			29	√		
58	WOM Finance, PT	Jl. Gatot Subroto No. 169 A, Tawang Sari, Kebonsari	15	1			16	√		
59	Ngesti Waluyo, RSK	Jl Pahlawan Parakan Temanggung	173	294			467		√	
60	PKU Muhammadiyah, RS	Jl Raya Kedu Km 2 Kalisat Bulu	144	196			340		√	
61	Gunung Sawo, RSU	Jl Gatot Subroto 56 Manding Tmg	20	50			70	√		
62	Apotik Waringin Mulya, Perusda	Jl Diponegoro 26 Tmg 56212	6	11			17	√		
63	Kintamani, Hotel	Jl Suwandi Suwardi Desa Madureso Tmg	7				7		√	
64	Chandra, Hotel	Jl Pahlawan No 27 Tmg Telp 491645	5	1			6	√		
65	Indraloka Griya Sentosa, PT	Jl Suwandi Suwardi No 3 Tmg	21	19			40		√	
66	Nirwana, Hotel	Jl.Suwardi Suwardi No. IIA Tmg	3	2			5		√	
67	Hotel Ayu	Jl. Kaloran No 1 Gandulan Temanggung	4	2			6	√		
68	Hotel Ardita	Jl. Raya Bulu –							√	

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	P R				
		Temanggung	2	3			5			
69	PT. Lasri Ayu sahardja Mulya	Jl Raya Temanggung Bulu KM 04 Bulu Temanggung	10	5			15	√		
70	PT Eco Rizky Munza (SPBU Karanggedong)	Jl. Ngadirejo - Parakan Karanggedong	7	9			16	√		
71	Lia Resto	Jl. Wonosobo Km 3, Tanduran, Catuanom	6	4			10	√		
72	RM Jambu Klutuk	Jl Raya Parakan-Wonosobo Km 3 Tandura Caturanom Parakan	23	5			28	√		
73	RM Nikki	Jl Jendral Gatot Subroto Pandean Tmg	9	12			21	√		
74	RM. Lukito	Badran kranggan temanggung	14	22			36	√		
75	Pondok Lesehan Kampoeng Sawah	Jl Gatot subroto no 25 kebonsari tmg	23	19			42	√		
76	Perusda Aneka Usaha	Jl Jend Sudirman 140 tmg	20	12			32	√		
77	CV. Mahendra Citra Media	Jl. Terusan Sumbing 3 No 2 Temanggung	11	6			17	√		
78	Cendana Giri, CV	Jl. Gatot Subroto No.7 Temanggung	39	13			52	√		
79	Sudirman Motor, CV	Jl. Jendral Sudirman No. 65, Tmg	14	12			26	√		
80	PT Rejeki Sukses Santoso (Mataram Sakti)	Jl. Raya Kranggan No.38	20	6			26	√		
81	Tirtamas Lestari, PT	Jl Raya Pikatan Mudal Tmg	141	35			176	√		
82	PDAM "Tirta Agung" Kab	Jl Suyoto No. 3B, Temanggung	87	18			105	√		

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	PR				
	Temanggung									
83	CV. Catur Manunggal Sejati	Jln Mayjend Sutoyo RT 06/06 Tmg	41	56			97	√		
84	PT. Swalayan Mahkota	Jl. MT Haryono No. 63 Temanggung	77	111			188	√		
85	Pandean Square	Jl MT Hariyono No 68 Pandean Tmg	7	8			15	√		
86	Surya Swalayan	Jl Diponegoro 14 Tmg	21	17			38	√		
87	Surya Timur, CV	Jl. Suyoto No. 15 Temanggung	6	14			20	√		
88	Safari Dharma Jaya/Sakti, PO	Jl Diponegoro 25 Tmg	301	32			333	√		
89	CV. Unicon Precast Concretes	Jl Raya Kranggan Pringsurat Kupon Pringsurat Tmg	12	3			15	√		
90	Vas Catering	Sanggrahan Rt 01 Rw 01 Kranggan Temanggung	15	6			21	√		
91	PT. Intiplas Sukses Makmur	Jl. MT. Haryono No. 53 Tmg	178	5			183	√		
92	Telkom, PT	Jl.Jed.Sudirman Tmg.	18	2			20	√		
93	CV Citra Kasih	Jl Pahlawan No 53 Tmg	32	23			55	√		
94	CV Prima Utama	Jl Sundoro No 16 Kertosari Tmg	42	1			43	√		
95	Bhumi Phala Wisata, PD	Kompleks Pikatan Water Park RT 5 RW 5, Mudal	31	15			46	√		
96	PT Gudang Garam, Tbk	Jln. Raya Bulu KM 5 Temanggung	74	10			84	√		
97	Toko Kondang	Jl WR Supratman 19 Tmg		8			8	√		
98	Ceto 3, Ternak Ayam	Ds Keblukan Kec. Kaloran Kab. Tmg	5	7			12			
99	CV. Organik Super Agro	Jln, Raya Jogja-Semarang Pringsurat	33				33			

NO	NAMA	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				UMK			
			WNI		WNA		JML	Sudah	Belum	Sebagian
			LK	PR	LK	P R				
		Temanggung								
100	CV Niaga Perkasa	Jl Sundoro No 16 Kertosari Tmg	10	3			13			
101	Toko Renes	Jln. Pahlawan No 2C Temanggung		8			8			
102	Arjuna, Toko Mas	Jl Letjend S Parman 19 Tmg.	3	10			13			
103	PT. Wahana Dinamika Muda	Jl. Suwandi Suwardi No.2, Temanggung	51	53			104			
104	PT. Djasa-Djasa	Jl. Tentara Pelajar 2B, Temanggung					77			
105	CV Karya Pratama	Petirejo, RT 03/02, Ngadirejo	2	140			142			
106	PT. PLN Parakan	Jl. Raya Kedu Km 2 Parakan	168	10			178			
107	CV Kukuh Tentrem Santoso	Krajan I, Kandangan	32	27			59			
108	PT. Kelola Agro Makmur	Jl. Raya Krangan-Pringsurat KM 2,2, Kranggan	77	73			150			
109	PT. Shoenary Javanesia Inc	Jl. Raya Temanggung-Secang KM 8, Kranggan	793	1.362	6	1	2.162			
		Jumah Total	11.453	9.651	21	4	21.206			

10. Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial

Pengertian Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:

1. Serikat pekerja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama tripartit
5. Perjanjian kerja bersama
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah mempunyai sarana hubungan industrial untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial adalah jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Sarana hubungan industrial yang dihitung adalah sebagai berikut :

- Perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja yang berpedoman pada peraturan perusahaan bagi perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja
- Serikat Pekerja
- LKS Bipartit
- Kepesertaan BPJS

Tabel B.10a.
Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan	%
2015	51	280	18,21
2016	54	397	13,60
2017	60	397	15,11
2018	62	397	15,62
2019	15	397	3,8
2020	15	397	3,8

Data Tahun 2015-2016 diatas didapat dari perusahaan yang menyetorkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). Kemudian data Tahun 2017-2018 belum ada perubahan data karena pada tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan se Kabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan atau sekitar 25% dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja dan 15 perusahaan yang memenuhi sarana Hubungan Industrial.

Tabel B.10b.
Data Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JENIS PERATURAN		BPJS		LKS BIBARTIT	SP/SB
			PP	PKB	TK	KES		
1	Duta Sumpit Indonesia, PT	Pengolahan Kayu	1		114	356	1	1
2	Tanjung Kreasi Parquet Industry, PT	Pengolahan Kayu		1	1.145	1.145	1	1
3	Dharma Satya Nusantara, PT	Pengolahan Kayu		1	1.095	1.095	1	1
4	Sekawan Sumber Sejahtera, PT	Pengolahan Kayu	1		478	392	1	1
5	Sinar Sengon Sejahtera, CV	Pengolahan Kayu	1		789	789	1	1
6	PT. Albasia Temanggung Jaya	Pengolahan Kayu	1		112	7	1	1

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JENIS PERATURAN		BPJS		LKS BIBARTIT	SP/SB
			PP	PKB	TK	KES		
7	PT. Prima Wana kreasi wood Industri	Pengolahan Kayu		1	430	306	1	1
8	PT. Eastmark International Indonesia	Pengolahan Kayu		1	319	319	1	1
9	PT. Kayu Sengon Industri	Pengolahan Kayu		1	232	232	1	1
10	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Pengolahan Kayu	1		1.660	1.646	1	1
11	PT. YB Apparel Jaya	Garment Pakaian Jadi	1		1.141	1.141	1	1
12	BRI (Persero) Tbk Kanca Tmg, PT	Jasa Perbankan		1	201	201	1	1
13	Ngesti Waluyo, RSK	Rumah Sakit		1	399	399	1	1
14	CV. Organik Super Agro	Pupuk Briket	1		10	10	1	1
15	PT. Kelola Agro Makmur	Frozen Vegetable	1		34	41	1	1

11. Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang :

- Bipartit (intern antara perusahaan dan pekerja)
- Mediasi (dengan perjanjian bersama)
- Arbitrasi (mediasi melalui lembaga arbitrase)
- Pengadilan HI dan Mahkamah agung.

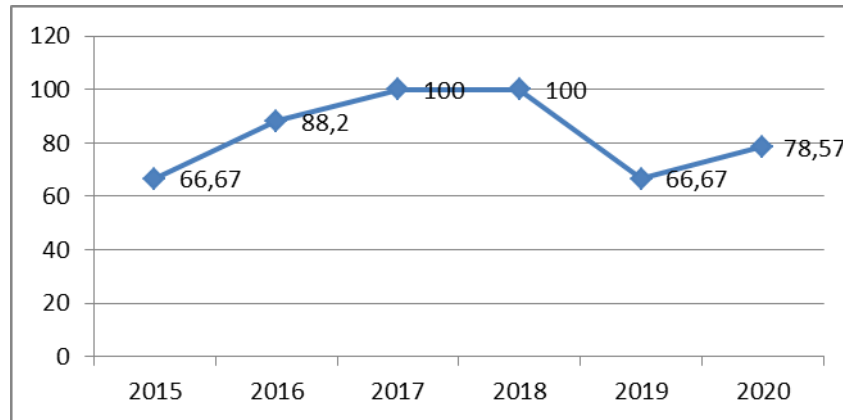
Namun demikian pemerintah kabupaten dalam hal ini Disnaker Kab. Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan penyelesaian melalui Perjanjian Bersama.

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel B.11a.
Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB
Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	Jumlah Perselisihan yang masuk	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	%
2015	15	10	66,67
2016	17	15	88,2
2017	13	13	100
2018	12	12	100
2019	3	2	66,67
2020	14	13	92,86

Grafik B.11.
Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 Triwulan IV tingkat penyelesaiannya naik. Hanya 1 kasus yang tidak terselesaikan dan telah masuk ke pengadilan HI di tingkat propinsi.

Tabel B.11b.
Daftar Kasus yang Masuk ke Disnaker Tahun 2020

No	Tgl Masuk Kasus	Jenis Kasus	Status Kasus
1	20/01/2020	Perselisihan PHK	selesai
2	21/01/2020	Perselisihan hak	selesai
3	24/02/2019	Perselisihan hak	selesai
4	28/05/2019	Perselisihan hak	selesai
5	2/06/2019	Perselisihan hak	selesai
6	16/06/2019	Perselisihan hak	selesai
7	20/06/2020	Perselisihan hak	selesai
8	22/06/2020	Perselisihan hak	selesai
9	18/08/2019	Perselisihan hak	selesai
10	7/9/2020	Perselisihan hak	selesai
11	5/10/2020	Perselisihan hak	Naik ke Pengadilan HI
12	9/10/2020	Perselisihan PHK	selesai

13	23/11/2020	Perselisihan hak	selesai
14	10/12/2020	Perselisihan hak	selesai

12. Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang.

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan personal skill, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

Rumus Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas) dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%.

Tabel B.12.
Presentase Peserta Pelatihan Produktivitas Kewirausahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	%
2015	-	-	-
2016	16	80	20
2017	23	100	23
2018	27	80	33,75
2019	5	25	20
2020	5	25	20

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru terhambat pelaksanaannya karena pandemic covid-19, pelatihan baru dapat dimulai dan selesai pada bulan September, dan pada bulan Desember terdata 5 peserta meningkat produktivitasnya/menjadi lebih berkembang. Indikator ini baru masuk di Indikator kinerja Disnaker mulai tahun 2016.

➤ **BIDANG TRANSMIGRASI**

1. Presentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran

Pembekalan berupa sosialisasi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban di daerah penempatan dan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk usaha di daerah penempatan.

Rumus Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan adalah jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%.

Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan tahun 2015 s.d. 2020 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel B.13.
Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan
Tahun 2015 s.d. 2020 Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan	0	15	5	4	5	0
Jumlah calon transmigran	0	15	5	4	5	0
Persentase	0	100	100	100	100	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu dilakukan pembekalan terhadap calon transmigran, baik oleh kabupaten Temanggung maupun pembekalan oleh Pemerintah Provinsi

Untuk tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19.

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan

melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menurut misi 2 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018-2023

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 2 (Ketiga): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya investasi sektor riil

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Salah satu upaya untuk Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kabupten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS
1	2	3	4
1	Perluasan Kesempatan Kerja	1 Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	
1	2	3	4	
		2	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%
		3	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%
		4	Tingkat setengah pengangguran	jumlah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%
		5	Persentase Tenaga Kerja formal	jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah seluruh tenaga kerja dikali 100%
2	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	6	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	jumlah tenaga kerja peserta BPJS dibagi jumlah tenaga kerja total
		7	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	jumlah perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
		8	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
		9	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dikali 100%
3	peningkatan produktivitas tenaga kerja	10	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%
4	pemberdayaan transmigran	11	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	jumlah calon transmigran yang mendapatkan pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, Kepala Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja seperti table di bawah ini.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2020
1	2	3		4	5
1	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	65
		2	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	75
		3	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	57
		4	Tingkat setengah pengangguran	%	6
		5	Persentase Tenaga Kerja formal	%	28
2	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	6	Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	76
		7	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	83
		8	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	30
		9	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100
3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	10	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	30
4	Pemberdayaan transmigran	11	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 6.025.758.100,- Komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.618.179.340,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 1.407.578.760,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	2	3	4	5
1	Perluasan Kesempatan Kerja	2.202.933.100	2.202.933.100	2.195.801.100
2	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	99.866.000	99.866.000	99.866.000
3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	95.502.500	95.502.500	95.502.500
4	pemberdayaan transmigran	69.565.000	69.565.000	57.065.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disnaker Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Disnaker Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (Renstra Disnaker Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2020			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 : Perluasan Kesempatan Kerja						
1	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	65%	19,06%	29,32%	80%	23,83%
2	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%	55,33%	73,77%	82%	67,48%
3	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	57%	58,7%	100%	65%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2020			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Tingkat setengah pengangguran	6,00%	5,10%	100%	5,70%	100%
5	Persentase Tenaga Kerja formal	28%	31,69%	100%	31%	100%
	Rata-rata	46,20%	33,98%	80,62%	52,74%	78,26%
	Predikat			Baik		Baik
Sasaran 2 : Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja						
1	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	76,00%	65,67%	86,41%	79%	100%
2	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	83%	21,16%	25,49%	88%	82,33%
3	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	30%	25,42%	84,73%	45%	100%
4	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100%	66,67%	85,71%	100%	66,67%
	Rata-rata	72,25%	44,62%	70,59%	70,00%	81,57%
	Predikat			Baik		Baik
Sasaran 3 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja						
1	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	30%	20,0%	66,67%	45%	44,44%
	Rata-rata	30,00%	20,00%	66,67%	45,00%	44,44%
	Predikat			Cukup		Kurang
Sasaran 4 : Pemberdayaan transmigran						
1	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	100%	0%	0%	100%	0%
	Rata-rata	100,00%	0%	0%	100,00%	0%
	Predikat			Kurang		Kurang

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Disnaker Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023).

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Disnaker Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2020 dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 4 sasaran dan 11 indikator kinerja sesuai dengan Indikator Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	0	3
2	Sangat baik	0	1
3	Baik	1	2
4	Cukup	1	2
5	Kurang	2	3
Jumlah		4	11

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 sasaran rata-rata capaiannya Sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Perluasan Kesempatan Kerja	5	80,62%	Baik
2	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	4	65,83%	Cukup
3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1	66,67%	Cukup
4	Pemberdayaan transmigran	1	0%	Kurang
Jumlah		11	55,46%	Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 11 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 dapat tercapai 53,13% dengan kategori “**Kurang**”.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja terdapat 4 sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja yang telah diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

1. Sasaran 1 (Perluasan Kesempatan Kerja)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini maka dilakukan pengukuran kinerja seperti tabel berikut :

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Perluasan Kesempatan Kerja

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2019			CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2018)			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	65%	19,06%	29,32%	60%	38,75%	64,58%	80%	23,83%
2	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	75%	55,33%	73,77%	70%	69,20%	98,86%	82%	67,48%
3	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	57%	58,7%	100%	55%	68,2%	100%	65%	100%
4	Tingkat setengah pengangguran	6,00%	5,10%	100%	6,10%	6,20%	98,39%	5,70%	100%
5	Persentase Tenaga Kerja formal	28%	31,69%	100%	27%	27,94%	100%	31%	100%
	Rata-rata	46,20%	33,98%	80,62%	43,62%	42,05%	92,37%	52,74%	78,26%
	Predikat			Baik					Baik

Capaian kinerja dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dicapai dengan kategori sangat baik. Untuk capaian kinerjanya diukur dari 5 (lima) indikator yaitu :

- 1) Indikator Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru. Terealisasi 19,06% dari target 65%, tercapai 29,32%. Lebih rendah 35,26% dari Tahun sebelumnya yaitu 64,58%

Rumus = Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja dibagi Jumlah peserta pelatihan keterampilan dikali 100%

$$= 61 \text{ orang} \div 320 \text{ orang} \times 100\% = 19,06\%$$

faktor penghambatnya karena monitoringnya belum maksimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan di Bulan Oktober 2020, sehingga baru mendapatkan data 61 orang yang telah bekerja dari 320 orang

- 2) Indikator Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

Terealisasi 55,33% dari target 75%, Tercapai 73,77%. Atau turun 25,09% dari tahun sebelumnya yaitu 98,86%

Rumus = jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.

$$= 602 / 1088 \times 100\% = 55,33\%$$

Di Tahun 2020 jumlah pencari kerja maupun jumlah penempatan pencari kerja sama – sama menurun, dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang membuat banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan dan banyak pencari kerja yang menghindari kerumunan dan memilih mencari kerja dari rumah dan bahkan berwirausaha dari rumah secara online.

- 3) Indikator prosentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi.

Terealisasi 58,7%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 57% sehingga tercapai 100%. Tercapai seperti tahun 2019 yaitu 100%, karena animo

masyarakat untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja tidak begitu banyak, dan paket pelatihan yang dibuka hamper dapat memenuhi permintaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemda telah memperhatikan hal ini dengan memberikan anggaran yang lebih besar.

Rumus indikator = jumlah pencaker yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar dikali 100%

Jumlah pendaftar pelatihan = 545 orang

Jumlah pencaker yang mendapat pelatihan = 320 orang

4) Indikator Tingkat setengah pengangguran

Terealisasi 5,1%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 6% tercapai 100%. Indikator ini merupakan indikator SDGs.

Rumus indikator = Jumlah setengah pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%

= 23.236 orang / 455.242 orang x 100% = 5,1%

Perolehan data dari BPS. Seluruh kegiatan di Disnaker akan mendukung indikator ini.

5) Indikator Persentase Tenaga Kerja formal.

Terealisasi 28%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 31,69% tercapai 100%. Indikator ini merupakan Indikator SDGs.

Rumus indikator = jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%

= 139.942 orang / 441.632 orang x 100% = 27,94%

Perolehan data dari BPS.

2. Sasaran 2 (Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, maka dilakukan pengukuran kinerja seperti tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2020			CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2019)			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	76,00%	65,67%	86,41%	75,00%	87,15%	100,00%	79%	100%
2	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	83%	21,16%	25,49%	80%	72,45%	90,56%	88%	24,05%
3	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	30%	25,42%	84,73%	25%	100%	100%	45%	100%
4	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	100%	66,67%	85,71%	100%	66,67%	66,67%	100%	92,86%
	Rata-rata	72,25%	44,62%	61,76%	70,00%	81,57%	89,31%	78,00%	77,44%
	Predikat			Cukup					Cukup

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dicapai dengan kategori sangat baik. Untuk capaian kinerja meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran diukur dari 4 (empat) indikator yaitu :

- 1) Indikator Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Terealisasi 65,67%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 76% tercapai 66,67%. Turun 33,33 dari tahun sebelumnya 100%.

Rumus indikator = jumlah pekerja/buruh peserta program BPJS dibagi jumlah pekerja/buruh dikali 100%

jumlah pekerja/buruh peserta program BPJS = 18.223

jumlah pekerja/buruh = 27.751

belum tercapai karena Rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan dan kurangnya kesadaran pengusaha untuk mensejahterakan pekerjaanya.

- 2) Indikator Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK. Terealisasi 21,16%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 83% tercapai 25,49%. Turun 56,84% dari tahun sebelumnya 82,33%.

Rumus indikator = jumlah perusahaan yang telah membayar upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%

$$= 84/397 \times 100\% = 21,16\%$$

belum tercapai karena belum semua perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar upah sesuai UMK, apalagi dengan adanya pandemic covid-19 serta kurangnya kesadaran pengusaha dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya akan terus didorong dan dilakukan sosialisasi tentang kewajiban membayarkan upah sesuai UMK.

- 3) Indikator Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial.

Terealisasi 25,42%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 30% tercapai 84,73%. Turun sebesar 15,27% dari tahun sebelumnya yaitu 100%.

Rumus indikator = jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100 %

Belum tercapai karena hanya perusahaan – perusahaan besar saja yang mempunyai sarana PP/PKB, SP/SB, LKS Bipartit dan mengikutsertakan BPJS pekerjaanya.

- 4) Indikator Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama.

Terealisasi 85,71%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%, tercapai 85,71%. Naik 19,04 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,67%

Rumus indikator = jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali 100%

$$= 12/14 \times 100\% = 85,71\%$$

Satu kasus naik ke Pengadilan HI tingkat propinsi dan satu kasus selesai di tingkat Bipartit. Sehingga dapat dikatakan semua kasus yang masuk telah ditangani dengan baik oleh Disnaker.

3. Sasaran 3 (Peningkatan produktivitas tenaga kerja)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 3 ini maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Peningkatan produktivitas Tenaga Kerja

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2020			CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2019)			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	30%	20,0%	80,00%	25%	20,0%	80,00%	45%	44,44%
	Rata-rata	30,00%	20,00%	66,67%	25,00%	20,00%	80,00%	45,00%	44,44%
	Predikat			Baik					Kurang

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3

Hanya mempunyai satu indikator pada sasaran ini, dan dapat dicapai dengan kategori baik. Untuk capaian kinerja diukur dari indikator :

1. Indikator Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang.

Terealisasi 20%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 30%, sehingga tercapai 66,67%. Turun 13,33% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 80%.

Rumus indikator = jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%

$$= 5/25 \times 100\% = 20\%$$

Faktor penghambatnya karena baru dijalankan kegiatannya di bulan Oktober 2020. Monitoring blm maksimal dilakukan.

4. Sasaran 4 (Program Pemberdayaan Transmigran)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 ini, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Pemberdayaan Transmigran

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI 2020			CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2019)			CAPAIAN Thd. TARGET AKHIR RENSTRA	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
	Rata-rata	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
	Predikat			Kurang			Memuaskan		Kurang

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4

Capaian indikator pada sasaran Pemberdayaan Transmigran dicapai dengan kategori Kurang. Untuk capaian kinerja Pemberdayaan Transmigran diukur dari 1 (satu) indikator saja, yaitu Indikator Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan, terealisasi 0% Sedangkan targetnya adalah 100% dan berarti tercapai 0%. Belum tercapai karena pandemic Covid-19 mengakibatkan tidak adanya kuota Transmigran dari pusat dan karenanya anggaran APBD juga ikut terasionalisasi.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Keuangan

Dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, Dinas Tenaga Kerja juga mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan selama tahun 2020. Pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 didukung dengan Anggaran sebesar Rp 6.510.656.330,- dan setelah terasionalisasi dan refocusing akibat Pandemi Covid-19, perubahan anggaran menjadi Rp.6.025.758.100,- berkurang Rp.484.898.230,- atau sebesar 7,45%. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.8a.
Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih	
				(Rp.)	%
	Belanja Tidak Langsung	4.618.179.340	4.533.240.772	84.938.568	1,84
1	Belanja Pegawai	4.618.179.340	4.533.240.772	84.938.568	1,84
	Belanja Langsung	1.407.578.760	1.367.378.771	40.199.989	2,86
1	Belanja Pegawai	499.105.000	436.495.000	12.610.000	2,81
2	Belanja Barang dan Jasa	659.304.460	635.316.271	23.988.189	3,64
3	Belanja Modal	299.169.300	295.567.500	3.601.800	1,20
	Jumlah Belanja	6.025.758.100	5.900.619.543	125.138.557	2,08

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8b.
Realisasi Anggaran yang mendukung Visi Misi Bupati

No	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISAS I	%
1	2	3		4	5	6
	Sasaran 1 : Perluasan Kesempatan Kerja		949.832.525	588.382.200	581.900.037	98,82 %

No	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3		4	5	6
1	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	Program perluasan kesempatan kerja	949.832.525	588.382.200	581.900.037	98,82 %
2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Penyebarnya kesempatan kerja	86.087.000	8.672.900	8.672.900	100%
3	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	2 Operasional Warung / Kios 3 in1	23.869.000	23.869.000	23.646.397	99,07 %
4	Tingkat setengah pengangguran	3 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	99.998.465	90.457.000	0	0%
5	Persentase Tenaga Kerja formal	4 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan pemagangan	266.671.000	266.671.000	264.013.240	99%
		5 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan kerja	344.545.000	289.169.300	285.567.500	98,75 %
		6 Penyelenggaraan Job Fair	90.457.000	0	0	0%
		7 Pelatihan Teknik Pengelasan (M)	0	0	0	0%
		8 Pelatihan Tenaga Kerja	0	0	0	0%
Sasaran 2 : Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja			156.390.700	71.580.000	70.968.794	99,15 %
1	Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	156.390.700	71.580.000	70.968.794	99,15 %
2	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	18.519.200	7.308.000	7.223.000	98,84 %
3	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	2 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	137.871.500	64.272.000	63.745.794	99,18 %
4	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama					
Sasaran 3 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja			38.318.100	57.348.100	55.944.700	97,55 %
1	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja	38.318.100	57.348.100	55.944.700	97,55 %
		1 Pelatihan Wira Usaha Baru	38.318.100	38.318.100	37.106.800	96,84 %
		2 Penyusunan DED Rehab Workshop Gedung Otomotif	0	19.030.000	18.837.900	98,99 %
Sasaran 4 : Pemberdayaan transmigran			37.353.000	320.000	320.000	0,9%

No	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3			4	5	6
1	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan		Program pemberdayaan transmigran	37.353.000	320.000	320.000	0,9%
1		1	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	37.353.000	320.000	320.000	0,9%
JUMLAH				1.181.894.325	717.630.300	709.133.531	98,82 %

2. Analisa Efisiensi

Prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan sumber daya yang ada dan dalam kondisi di masa Pandemi Covid-19 melakukan inefisiensi sebesar 19,63%. Sehingga dapat dikatakan dengan sumber daya dan dengan anggaran yang ada, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak dapat memenuhi target kinerjanya. Secara rinci dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 3.9.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Perluasan Kesempatan Kerja	98,82%	80,62%	-18,2%
2.	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	99,15%	70,59%	-28,56%
3.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	97,55%	66,67%	-30,88%
4.	Pemberdayaan transmigran	0,9%	0%	-0,9%
			Rata-rata	-19,63%

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena 1 target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**, 1 target sasaran dicapai dengan kategori **Baik**, 1 target sasaran dicapai dengan kategori **Cukup** dan 1 target sasaran dicapai dengan kategori **Kurang**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 1. Perluasan Kesempatan Kerja dicapai 80,62% (**sangat baik**), dengan indikator rincian per sasaran :
 1. Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru dicapai 29,32%,
 2. Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dicapai 73,77%,
 3. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dicapai 100%.
 4. Tingkat setengah pengangguran dicapai 100%
 5. Persentase Tenaga Kerja formal dicapai 100%
- b. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dicapai rata-rata 66,67% (**Cukup**), dengan indikator rincian per sasaran :
 1. Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dicapai 86,41%,
 2. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK dicapai 25,49%.

3. Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dicapai 84,73%,
 4. Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama dicapai 66,67%.
- c. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dicapai 66,67% (**Cukup**), dengan indikator Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang dicapai 66,67%,
- d. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 4. Pemberdayaan transmigran dicapai 0% (**Kurang**), dengan indikator sasaran Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan dicapai 0%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan dan memperkuat peran kelembagaan Disnaker.
2. Meningkatkan komitmen dan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian termasuk pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja.
3. Meningkatkan mekanisme manajemen internal organisasi dalam pro aktif memonitor dan mengevaluasi

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih

Temanggung, Februari 2021
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001